

MEMPERKUAT TATA KELOLA SUMBER DAYA LAUT YANG ADAPTIF MELALUI PEMBELAJARAN SOSIAL KOMUNITAS PRAKTIK MULTI-STAKEHOLDER DI PULAU BINTAN UTARA

Tri Samnuzulsari¹, Siti Arieta², Athika Thahira³, Imam Yudhi Prastya⁴, Edison⁵

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

^{4,5}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email Korespondensi: 3nuzulsari@umrah.ac.id

Email: arietasiti@umrah.ac.id; atikatahiraswim@gmail.com; yudhiimam02@gmail.com;

edison@umrah.ac.id

ABSTRACT

The management of marine resources in small island regions is often hampered by fragmented knowledge systems, overlapping institutional mandates and a lack of coordination among stakeholders, which hinders the development of effective and adaptive governance. This article highlights how social learning within a Community of Practice (CoP) involving various stakeholders contributes to strengthening marine resource governance in this context. This study adopts a qualitative case study approach focusing on the Jaringan Peduli Laut (JALA) in North Bintan Island, Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and field observations, enabling a deep understanding of the processes of interaction and collaborative practices amongst the actors. Findings indicate that social learning emerges through sustained interaction, reflective dialogue, and repeated collective practices involving civil society organisations, local communities, government agencies, and academic actors. These processes facilitate the integration of local ecological knowledge with scientific perspectives, whilst fostering trust, shared understanding, and distributed leadership across the network. CoPs evolve beyond knowledge-sharing platforms into mechanisms that strengthen collective capacity to support joint adaptive management. This is evident in the emergence of community-based conservation initiatives, improved coordination in addressing coastal environmental challenges, and the gradual strengthening of institutional legitimacy at the local level. Although there have been positive developments, several challenges remain, including disparities in organisational capacity, communication barriers, and the differing interests of stakeholders that continue to shape the direction of collaboration.

Keywords: Social learning, Community of practices, Adaptive co-management, Marine governance.

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya laut di wilayah pulau-pulau kecil seringkali terhambat oleh sistem pengetahuan yang terfragmentasi, tumpang tindihnya mandat kelembagaan, dan minimnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan, yang menghambat pengembangan tata kelola yang efektif dan adaptif. Artikel ini menyoroti bagaimana pembelajaran sosial (social learning) dalam Komunitas Praktik (Community of Practice/CoP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam memperkuat tata kelola sumber daya laut dalam konteks tersebut. Studi ini mengadopsi pendekatan studi kasus kualitatif yang berfokus pada Jaringan Peduli Laut (JALA) di Pulau Bintan Utara, Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi lapangan, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang proses interaksi dan praktik kolaboratif di antara para aktor. Temuan menunjukkan bahwa pembelajaran sosial muncul melalui interaksi berkelanjutan, dialog reflektif, dan praktik kolektif berulang yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan aktor akademis. Proses-proses ini memfasilitasi integrasi pengetahuan ekologi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

101

Indexed



SINTA 4



lokal dengan perspektif ilmiah, sekaligus menumbuhkan kepercayaan, pemahaman bersama, dan kepemimpinan yang terdistribusi di seluruh jaringan. CoP berkembang melampaui platform pertukaran pengetahuan menjadi mekanisme yang memperkuat kapasitas kolektif untuk mendukung pengelolaan adaptif bersama. Hal ini terlihat dari munculnya inisiatif konservasi berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi dalam menangani tantangan lingkungan pesisir, dan penguatan bertahap legitimasi kelembagaan di tingkat lokal. Meskipun terdapat perkembangan yang positif, beberapa tantangan tetap ada, termasuk ketimpangan dalam kapasitas organisasi, hambatan komunikasi, dan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda-beda yang terus membentuk arah kolaborasi

Kata kunci: Pembelajaran social, Komunitas praktik, Adaptive co-management, Tata kelola kelautan.

PENDAHULUAN

Ekosistem laut di wilayah pulau-pulau kecil semakin dihadapkan pada tekanan yang kompleks, yang biasanya dipicu oleh adanya perubahan iklim, ekspansi ekonomi, dan peningkatan pemanfaatan sumber daya. Tekanan ini sering kali menimbulkan tantangan dalam tata kelola sumber daya laut, yang ditandai dengan sistem pengetahuan yang terfragmentasi, tumpang tindihnya mandat kelembagaan, dan koordinasi yang terbatas di antara para pemangku kepentingan. Implikasinya tentu saja dapat menghambat pengembangan strategi pengelolaan yang adaptif dan efektif. Studi-studi terbaru menekankan bahwa tata kelola kolaboratif sangat penting dalam mengatasi kompleksitas tersebut, berupa koordinasi lintas tingkat kelembagaan, meningkatkan kepercayaan di antara para pelaku, dan memperkuat kapasitas pengambilan keputusan kolektif dalam sistem laut dan pesisir (Asio et al., 2026; Becker & Bodin, 2025). Dalam konteks pulau-pulau kecil, tantangan-tantangan ini semakin diperparah oleh kerentanan ekologis dan ketergantungan yang kuat pada sumber daya laut, sehingga pendekatan tata kelola yang adaptif dan inklusif semakin diperlukan (Bennett et al., 2021). Tanpa adanya mekanisme yang mampu menjembatani kesenjangan kelembagaan dan pengetahuan, inisiatif keberlanjutan di sistem pesisir sering kali tetap terfragmentasi dan kurang efektif dalam menangani perubahan lingkungan jangka panjang (van Noort et al., 2025).

Menanggapi persoalan ini, pembelajaran social (social learning) semakin diakui sebagai mekanisme kunci dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Pembelajaran sosial berupa proses interaksi, refleksi, dan produksi bersama pengetahuan di antara berbagai pemangku kepentingan, menjadi hal yang krusial untuk guna untuk mengembangkan pemahaman bersama dan merumuskan tanggapan terkoordinasi terhadap permasalahan sosio-ekologis yang kompleks (Biggs et al., 2022; Norström et al., 2020). Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa pembelajaran sosial memainkan peran penting dalam memfasilitasi perubahan transformatif dalam tata kelola laut dengan melakukan dialog lintas sektor dan mendorong praktik tata kelola reflektif (Michelle et al., 2025; van Noort et al., 2025). Dalam konteks pesisir dan laut, berbagai sistem pengetahuan hidup berdampingan. Proses-proses ini sangat penting untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan ekologi lokal dan pengalaman hidup, sehingga meningkatkan relevansi dan legitimasi pengambilan keputusan lingkungan (Michelle et al., 2025; van Noort et al., 2025).

Konsep Komunitas Praktik (Community of Practice/CoP) menyediakan lensa analitis untuk memahami bagaimana pembelajaran sosial dipertahankan melalui interaksi berkelanjutan dan keterlibatan bersama. Dalam tata kelola lingkungan, CoP telah terbukti mendukung pertukaran pengetahuan, memperkuat jaringan, dan meningkatkan kapasitas kolektif di antara pemangku kepentingan yang beroperasi melintasi batas-batas kelembagaan (Hovardas, 2021; van Noort et al., 2025). Selain itu, CoP turut memainkan peran penting dalam mengatasi fragmentasi tata kelola dengan menghubungkan para aktor, memfasilitasi komunikasi, dan mendukung proses pembelajaran iteratif dalam sistem sosio-ekologis (Asio et al., 2026; Becker & Bodin, 2025). Pendekatan inklusif dan partisipatif yang tertanam dalam komunitas semacam itu juga telah dikaitkan dengan hasil lingkungan yang lebih baik dan legitimasi

kelembagaan yang lebih besar (Bennett et al., 2021).

Meskipun begitu, celah riset ini tetap ada. Studi yang ada cenderung menekankan peran fungsional dari Komunitas Praktik sebagai platform pertukaran pengetahuan, dengan sedikit perhatian terhadap bagaimana proses pembelajaran sosial berlangsung dalam praktik di lingkungan multi-pemangku kepentingan yang ditandai oleh ketidakseimbangan kekuasaan, batasan institusional, dan kepentingan yang beragam. Selain itu, bukti empiris mengenai bagaimana proses pembelajaran ini diterjemahkan menjadi hasil tata kelola adaptif dalam konteks pulau kecil juga masih terbatas (Asio et al., 2026; Michelle et al., 2025). Kesenjangan ini sangat signifikan mengingat konteks tersebut seringkali memerlukan pendekatan tata kelola yang fleksibel dan sensitif terhadap konteks, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan prioritas yang saling tumpang tindih.

Studi ini berupaya mengkaji proses pembelajaran sosial yang beroperasi dalam Komunitas Praktik (Community of Practice) multi-pemangku kepentingan yaitu Jaringan Peduli Laut (JALA) Bintan, dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada penguatan tata kelola sumber daya laut. Artikel ini bertujuan menganalisis proses-proses di mana pengetahuan diintegrasikan, hubungan dikembangkan, dan kapasitas kolektif diperkuat di antara organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan aktor akademisi. Dengan menempatkan dinamika ini dalam kerangka tata kelola laut yang lebih luas, penelitian ini berupaya memberikan wawasan empiris mengenai bagaimana Komunitas Praktik berfungsi sebagai mekanisme penghubung dalam sistem tata kelola yang terfragmentasi serta mendukung pengelolaan sumber daya laut yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

METODE

Studi ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dalam konteks Pulau Bintan Utara. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pembelajaran sosial dalam konteks multi-pemangku kepentingan. Pendekatan studi kasus dapat mengeksplorasi konteks secara mendalam terhadap dinamika interaksi, praktik, dan proses sosial dalam situasi nyata, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang kompleks (Creswell et al., 2007; Priya, 2021). Studi ini dilakukan pada jaringan JALA Bintan di zona pesisir Pulau Bintan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. JALA Bintan merupakan komunitas praktik yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil lokal, kelompok masyarakat di bidang perikanan dan pariwisata, seperti pokdarwis, pokmaswas, dinas terkait, serta akademisi yang terlibat dalam konservasi laut dan pengelolaan sumber daya. Informan dipilih secara purposif untuk mewakili kategori pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam JALA Bintan. Teknik purposive sampling digunakan karena memungkinkan memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan terhadap fenomena yang diteliti (Berndt, 2020). Informan ditetapkan berdasarkan kriteria yaitu (1) perwakilan organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam JALA; (2) kelompok masyarakat lokal, termasuk nelayan, pokdarwis, dan pokmaswas; (3) dinas terkait yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya pesisir; dan (4) akademisi yang berkolaborasi dengan komunitas JALA Bintan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci dari setiap kategori peserta, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi lapangan, dan telaah dokumen sekunder. Data wawancara mencakup topik-topik seperti peran peserta dalam JALA Bintan, persepsi tentang pembelajaran dan kolaborasi, serta pandangan mereka mengenai tata kelola sumber daya laut. Hasil wawancara kemudian ditranskrip secara verbatim untuk dianalisis guna memastikan keakuratan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan FGD dengan anggota kelompok masyarakat lokal (kelompok nelayan, pokdarwis, dan pokmaswas) untuk menangkap perspektif kolektif, yang melibatkan sekitar 6–8 peserta. Hasil FGD digunakan untuk melengkapi data wawancara dengan mendorong interaksi dan menyoroti isu-isu di level komunitas. Sementara itu, data observasi lapangan berupa hasil pengamatan pertemuan JALA Bintan, lokakarya, dan kegiatan lapangan berupa interaksi, proses pengambilan keputusan, dan dinamika kelompok, serta dokumen-dokumen yang relevan untuk mengontekstualisasikan temuan, termasuk notulen rapat JALA, laporan proyek, rencana komunitas, serta komunikasi publik atau

media apa pun tentang kegiatan JALA, dilakukan telaah lebih lanjut guna mencari bukti proses perencanaan, kesepakatan, dan evolusi historis CoP.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik melalui proses pengkodean terbuka, pengelompokan kategori, dan pengembangan tema yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan tata kelola (Braun & Clarke, 2021). Analisis dimulai dengan pengorganisasian data dan pemahaman mendalam melalui pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara, catatan FGD, dan catatan observasi. Selanjutnya, dilakukan pengkodean terbuka (open coding) untuk mengidentifikasi unit-unit informasi yang bermakna terkait pembelajaran sosial, kolaborasi, dan proses tata kelola. Kode-kode yang teridentifikasi dikelompokkan ke dalam kategori tematik yang sesuai dengan konsep-konsep analitis utama, termasuk interaksi, refleksi, dan proses pembelajaran berulang, serta integrasi pengetahuan, kepemimpinan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Tema-tema ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam kaitannya dengan kerangka konseptual Komunitas Praktik dan pembelajaran sosial. Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, triangulasi data diterapkan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, FGD, observasi, dan dokumen.

PEMBAHASAN

Integrasi Pengetahuan dalam Jaringan

CoP yang terdiri dari perwakilan pokmaswas, pokdarwis, kelompok nelayan, serta organisasi konservasi, berbagi dan menggabungkan berbagai sistem pengetahuan lokal secara terbuka, mulai dari pengetahuan ekologi tradisional masyarakat pesisir, hingga informasi ilmiah yang disampaikan oleh akademisi dan praktisi konservasi. Proses pertukaran dan sintesis pengetahuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman kolektif terhadap praktik konservasi, melainkan juga mendorong munculnya strategi pengelolaan yang lebih adaptif dan kontekstual. Dalam konteks ini, CoP Jala Bintang telah menunjukkan kapasitasnya sebagai ruang pembelajaran sosial yang menghargai keberagaman pengetahuan dan mendorong pengambilan keputusan berbasis kolaborasi lintas aktor. Mereka juga menunjukkan keterikatan yang kuat melalui interaksi dan kolaborasi aktif antaranggota dalam berbagai kegiatan lapangan dan forum diskusi, yang berangkat dari latar belakang berbeda, dengan berpartisipasi secara setara dalam merumuskan agenda kegiatan, membahas permasalahan lingkungan, dan mencari solusi kolektif. Dari proses ini, kemudian terbangun rasa saling percaya dan solidaritas yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan jejaring. Keterlibatan bersama dalam kegiatan konservasi, khususnya dalam kegiatan konservasi penyu di Pulau Mapur, tidak hanya memperkuat koordinasi lintas kelompok, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa upaya pelestarian sumber daya pesisir merupakan tanggung jawab bersama. Dinamika ini mencerminkan pergeseran dari hubungan kerja sektoral menuju bentuk kolaborasi berbasis pembelajaran sosial dan nilai kebersamaan.

Pembelajaran reflektif tercermin dalam cara CoP Jala Bintang mengelola proses pembelajarannya melalui refleksi kritis dan evaluasi bersama setelah kegiatan berlangsung, seperti melakukan peninjauan terhadap efektivitas metode yang digunakan, tantangan lapangan, serta peluang untuk peningkatan di kegiatan selanjutnya. Proses reflektif ini mendorong mereka untuk tidak hanya menilai hasil kegiatan secara teknis, tetapi juga meninjau kembali peran, komunikasi, dan koordinasi antaranggota. Pembelajaran yang dilakukan ini tidak berhenti pada tataran praktik, melainkan berkembang menjadi proses adaptasi sosial yang memperkuat kapasitas kolektif CoP dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas pengelolaan lingkungan pesisir. Pertemuan-pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan memperkuat kerja sama antar komunitas, dengan menyampaikan berbagai permasalahan seperti kendala komunikasi, respon dari pengurus yang sering terlambat, serta perlunya peningkatan koordinasi antar organisasi yang tergabung dalam CoP Jala Bintang. Hasilnya menunjukkan bahwa jejaring yang telah terbentuk ini memberikan implikasi yang positif, dengan menciptakan suasana yang terbuka dan partisipatif, sehingga dapat menjadi langkah bersama untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

104

Indexed



SINTA 4



Kepemimpinan dan Local Champions

Kepemimpinan dalam CoP Jala Bintang tumbuh secara organik melalui proses interaksi dan komitmen bersama di antara para anggota yang memiliki kepedulian terhadap isu sumber daya laut. Organisasi seperti Pokdarwis Pengudang, Lamun Warrior dan Bintang Black Coral, sebagai local champions, menunjukkan kendali kepemimpinan yang tidak mendominasi, namun justru mengayomi. Para local champions ini telah menunjukkan peran yang tidak hanya menggerakkan kegiatan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai partisipatif, transparansi, dan tanggung jawab kolektif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Mereka menjadi figur penghubung yang menjembatani beragam kepentingan antaranggota dan mendorong terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif. Kepemimpinan yang dibangun bersifat distributed leadership, di mana otoritas tidak terpusat pada satu individu, melainkan tersebar melalui praktik saling belajar dan dukungan timbal balik. Kehadiran mereka berperan penting sebagai katalis pembelajaran sosial, dimana mereka menumbuhkan kepercayaan, menjaga kohesi kelompok, dan memastikan agar CoP tetap berorientasi pada aksi nyata serta keberlanjutan gerakan. Dengan pola kepemimpinan semacam ini, CoP Jala Bintang mempertahankan vitalitasnya sebagai komunitas yang reflektif, adaptif, dan berdaya dalam memperjuangkan tata kelola kelautan yang inklusif dan berkeadilan.

Mekanisme kepemimpinan partisipatif dibangun melalui praktik rotasi peran, mentoring, dan musyawarah kolektif. Rotasi peran memungkinkan setiap anggota, baik dari kelompok masyarakat pesisir, aktivis konservasi, maupun akademisi pendamping CoP, untuk secara bergiliran mengambil tanggung jawab dalam perencanaan, fasilitasi, dan evaluasi kegiatan. Pendekatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap CoP dan mencegah ketergantungan pada figur tertentu. Hal ini terbukti dari hasil observasi terhadap tiga kegiatan yang dilakukan bersama CoP Jala Bintang sepanjang tahun 2025, yang meliputi: (1) pertemuan rutin pada bulan Mei 2025 di Desa Malang Rapat, dimana pertemuan ini berupaya menumbuhkan kembali semangat organisasi anggota komunitas setelah CoP dibentuk pada tahun 2024; (2) pertemuan pembelajaran konservasi penyu di Pulau Mapur pada Juli 2025, yang berfokus pada integrasi pengetahuan lokal serta (3) lokakarya Penyusunan Strategi dan Rencana Usaha/Kegiatan Organisasi Masyarakat Sipil di Bidang Kemaritiman di Kabupaten Bintang pada September 2025. Melalui rangkaian kegiatan tersebut terlihat bahwa CoP Jala Bintang menekankan prinsip musyawarah dan konsensus dalam setiap pengambilan keputusan. Forum rutin yang dilakukan JALA Bintang, baik secara daring maupun tatap muka, menjadi arena bagi anggota untuk menyampaikan pandangan, berbagi pengalaman lapangan, dan menegosiasikan strategi bersama. Pola ini memperkuat kohesi sosial dan memastikan bahwa setiap keputusan merepresentasikan aspirasi kolektif, bukan kepentingan individu.

Kepemimpinan partisipatif ini terbukti menjadi salah satu faktor kunci yang menopang keberlanjutan CoP Jala Bintang. Melalui pola kepemimpinan yang terbuka dan berbasis musyawarah, CoP mampu menjaga keterlibatan aktif anggotanya serta menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap arah gerakan bersama. Mekanisme rotasi peran memastikan distribusi tanggung jawab yang adil dan mendorong munculnya pemimpin-pemimpin baru dengan kapasitas berbeda, sehingga CoP tidak bergantung pada figur tunggal. Hal ini akan memperkuat daya tahan ketika menghadapi dinamika internal maupun perubahan eksternal, seperti pergeseran dukungan mitra atau perubahan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pola pendampingan yang dijalankan oleh para anggota turut berkontribusi terhadap regenerasi kepemimpinan di dalam komunitas. Proses pendampingan yang dilakukan secara informal melalui diskusi reflektif dan berbagi pengalaman lapangan mendorong tumbuhnya kesadaran kritis anggota terhadap pentingnya kolaborasi dan etika kerja kolektif.

Lebih lanjut, pendekatan ini menjadikan CoP Jala Bintang lebih mudah diterima oleh berbagai pemangku kepentingan eksternal. Pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan mitra swasta melihat pola kerja yang transparan dan inklusif sebagai cerminan legitimasi sosial. Keberhasilan CoP mempertahankan kepercayaan lintas aktor menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada dukungan sumber daya, tetapi juga pada social capital yang dibangun melalui kepemimpinan partisipatif. Dengan demikian, mekanisme ini berperan ganda: memperkuat kohesi internal dan sekaligus meningkatkan posisi

strategis CoP Jala Bintang dalam jejaring kolaborasi pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

Kepemimpinan partisipatif dalam CoP Jala Bintang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tata kelola internal, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi berlangsungnya proses social learning yang dinamis. Melalui kepemimpinan yang bersifat kolaboratif dan reflektif, setiap anggota memiliki ruang yang setara untuk berkontribusi, belajar, dan bereksperimen dengan pengetahuan baru. Pola ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang tidak hierarkis, di mana pengalaman praktis, pengetahuan lokal, dan wawasan ilmiah dapat saling dipertukarkan secara terbuka. Dalam praktiknya, kepemimpinan partisipatif memungkinkan terjadinya siklus pembelajaran berkelanjutan yang berangkat dari refleksi atas pengalaman lapangan, pengujian strategi baru, hingga evaluasi bersama atas hasil yang dicapai. Melalui proses ini, CoP Jala Bintang mampu mengembangkan kapasitas adaptif dan memperkuat kemampuan kolektifnya dalam merespons perubahan konteks sosial maupun ekologis. Selain itu, suasana saling percaya yang dibangun oleh para champions turut memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan rasa aman untuk berbagi pengetahuan tanpa rasa inferioritas.

Pembelajaran Iteratif dalam CoP Jala Bintang

Proses pembelajaran tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi berkembang menjadi siklus refleksi berulang di mana setiap organisasi anggota, yang terdiri dari kelompok nelayan, pokdarwis, pokmaswas, dan komunitas konservasi, kembali menggali akar permasalahan, potensi, serta kekuatan internal masing-masing. Melalui fasilitasi terbuka dan diskusi kelompok kecil, anggota CoP memberikan umpan balik satu sama lain terkait efektivitas program, pola komunikasi, serta strategi kolaborasi yang telah dijalankan. Proses ini menciptakan ruang bagi pembelajaran reflektif yang mendorong evaluasi diri dan penyesuaian strategi berdasarkan pengalaman kolektif. Hasil umpan balik tidak hanya memperjelas arah dan peran masing-masing organisasi dalam jaringan CoP, tetapi juga memperkuat kesepahaman mengenai visi bersama untuk memperjuangkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan. Siklus pembelajaran yang berulang ini menjadi mekanisme penting dalam menjaga relevansi dan adaptivitas CoP terhadap dinamika sosial dan lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan komunitas pembelajaran bergantung pada kemampuan untuk terus mengkaji, memperbaiki, dan menyelaraskan tujuan bersama dengan realitas lapangan.

Keterlibatan Stakeholders dan Pemberdayaan

Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut memperkaya proses pembelajaran kolektif di dalam CoP, baik melalui pemberian materi substantif, seperti penanganan tumpahan minyak hitam di perairan Bintan, maupun melalui dorongan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan CoP. Misalnya, Kesbangpol Bintan yang menyatakan dukungan agar organisasi yang menjadi anggota CoP Jala Bintang segera memiliki status badan hukum, guna memperkuat legitimasi dan kapasitas advokasinya. Sementara itu, COAST Facilities memberikan peluang konkret bagi organisasi anggota CoP untuk mengakses dana hibah yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui interaksi lintas lembaga ini, CoP Jala Bintang tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembelajaran sosial, tetapi juga sebagai ruang kolaboratif yang mendorong redistribusi pengetahuan, sumber daya, dan kekuasaan di antara aktor negara, akademisi, dan masyarakat sipil. Sehingga pembelajaran yang terjadi bersifat siklikal dan transformatif yang mendorong para anggota untuk terus memperbaiki strategi, memperkuat jejaring, dan meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan pesisir secara berkelanjutan.

Kolaborasi yang terbangun dalam lokakarya CoP Jala Bintang pada September 2025 ternyata juga berdampak langsung pada penguatan kapasitas dan kemandirian komunitas pesisir. Melalui interaksi dengan berbagai lembaga teknis dan akademik, komunitas seperti pokmaswas, pokdarwis, kelompok nelayan, kelompok konservasi, memperoleh kesempatan untuk memperluas pemahaman mereka tentang isu-isu lingkungan, tata kelola sumber daya laut, dan strategi adaptasi terhadap ancaman pencemaran

maupun eksploitasi wilayah pesisir. Kegiatan bersama yang dilakukan telah mendorong munculnya kesadaran baru di kalangan anggota komunitas tentang pentingnya posisi mereka sebagai aktor utama pengelolaan sumber daya bukan sekadar penerima manfaat program. Beberapa kelompok bahkan mulai merancang inisiatif lokal berbasis hasil pembelajaran lokakarya, seperti peningkatan pengawasan terhadap praktik pembuangan limbah di perairan Bintan, penyusunan peta wilayah tangkap tradisional, hingga gagasan untuk memperkuat sistem peraturan adat yang melindungi kawasan konservasi.

Melalui proses ini, CoP Jala Bintan bertransformasi dari sekadar forum koordinasi menjadi wadah pemberdayaan yang menghubungkan pengetahuan lokal dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya eksternal. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran sosial dalam CoP tidak berhenti pada ranah diskusi, melainkan berkembang menjadi aksi kolektif yang memperkuat posisi masyarakat pesisir sebagai mitra sejajar dalam tata kelola laut yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak yang terjalin antara organisasi yang tergabung dalam CoP menunjukkan dampak nyata terhadap proses pemberdayaan komunitas pesisir. Observasi selama kegiatan mencatat keterlibatan aktif dari berbagai kelompok akar rumput yang secara terbuka berbagi pengalaman tentang tantangan pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir Bintan. Melalui interaksi dengan lembaga teknis dan akademik, peserta memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana isu pencemaran laut, pengelolaan limbah industri, dan potensi ocean grabbing dapat dihadapi melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis pengetahuan lokal. Di sisi lain, anggota pokdarwis juga menyampaikan bahwa kegiatan ini membantu mereka memahami potensi wisata berbasis konservasi sebagai strategi ekonomi alternatif yang tidak merusak lingkungan. Dukungan dari pemangku kepentingan turut memperkuat arah pemberdayaan ini. Terlebih lagi, sesi yang difasilitasi oleh COAST Facilities adalah sebuah hal baru bagi komunitas akar rumput di Bintan, dan ini menumbuhkan semangat yang dapat dilihat dari beberapa organisasi anggota CoP juga mulai menyiapkan proposal hibah untuk memperluas kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Temuan studi ini menunjukkan bahwa CoP Jala Bintan telah berhasil menjadi arena pembelajaran sosial yang produktif, di mana refleksi, kolaborasi, dan aksi nyata berjalan beriringan. Proses pemberdayaan tidak hanya terjadi melalui transfer pengetahuan, tetapi juga melalui pengakuan terhadap kapasitas komunitas untuk bertindak, mengatur, dan memimpin upaya konservasi di wilayahnya sendiri. CoP Jala Bintan menegaskan dirinya sebagai model kolaborasi yang menumbuhkan kemandirian masyarakat pesisir sekaligus memperkuat tata kelola laut yang inklusif. Proses pembelajaran sosial yang berlangsung di dalam CoP Jala Bintan secara nyata menunjukkan adanya dimensi pemberdayaan yang kuat. Dalam konteks social learning framework, pemberdayaan ini tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kapasitas individu untuk memahami isu-isu lingkungan, tetapi juga sebagai transformasi relasi kekuasaan dan posisi tawar komunitas pesisir dalam tata kelola sumber daya laut.

Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan terjadi melalui tiga lapisan utama. Pertama, pemberdayaan kognitif, yaitu peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam mengelola sumber daya laut. Hal ini terlihat dari munculnya kesadaran baru di kalangan peserta bahwa pelestarian lingkungan harus melibatkan koordinasi antar desa, aparat pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Proses diskusi reflektif dalam lokakarya September 2025 memperkuat kemampuan komunitas untuk menafsirkan permasalahan ekologis dari perspektif sistemik, bukan sekadar peristiwa lokal. Kedua, pemberdayaan sosial, yang tampak melalui peningkatan jaringan kolaborasi antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan institusi akademik. Keikutsertaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kesbangpol Bintan, DLH, KPLP, PKSPL IPB, serta COAST Facilities memperluas akses komunitas terhadap sumber daya, pendampingan teknis, dan peluang pendanaan. Dalam kerangka pembelajaran sosial, interaksi ini memperlihatkan adanya bridging social capital yang memperkuat daya tawar komunitas di hadapan lembaga formal. Terakhir, pemberdayaan struktural, yaitu upaya memperkuat posisi kelembagaan CoP Jala Bintan agar memiliki legitimasi hukum

dan kapasitas advokasi yang lebih kuat. Dukungan Kesbangpol untuk pembentukan badan hukum serta peluang akses hibah dari COAST Facilities menandai transisi penting dari CoP sebagai forum diskusi menjadi organisasi dengan fungsi representasi dan pengaruh kebijakan. Proses ini mencerminkan transformasi dari learning community menuju governing community di mana masyarakat tidak hanya belajar dari pengalaman, tetapi juga menggunakannya untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

REFERENSI

- Asio, M. V. S., Cvitanovic, C., Lau, J., & Diedrich, A. (2026). Collaborative governance in marine and coastal management: A systematic review. *Ocean and Coastal Management*, 272. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.108020>
- Becker, P., & Bodin, Ö. (2025). The impact of political attention on collaborative environmental governance among municipal street-level bureaucrats. *Policy Studies Journal*, 53(4), 852–875. <https://doi.org/10.1111/psj.70020>
- Bennett, N. J., Katz, L., Yadao-Evans, W., Ahmadi, G. N., Atkinson, S., Ban, N. C., Dawson, N. M., de Vos, A., Fitzpatrick, J., Gill, D., Imirizaldu, M., Lewis, N., Mangubhai, S., Meth, L., Muhl, E. K., Obura, D., Spalding, A. K., Villagomez, A., Wagner, D., ... Wilhelm, A. (2021). Advancing social equity in and through marine conservation. *Frontiers in Marine Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.711538>
- Berndt, A. E. (2020). Sampling Methods. *Journal of Human Lactation*, 36(2), 224–226. <https://doi.org/10.1177/0890334420906850>
- Biggs, R., Clements, H. S., Cumming, G. S., Cundill, G., de Vos, A., Hamann, M., Luvuno, L., Roux, D. J., Selomane, O., Blanchard, R., Cockburn, J., Dziba, L., Esler, K. J., Fabricius, C., Henriksson, R., Kotschy, K., Lindborg, R., Masterson, V. A., Nel, J. L., ... Reyers, B. (2022). Social-ecological change: insights from the Southern African Program on Ecosystem Change and Society. *Ecosystems and People*, 18(1), 447–468. <https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2097478>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Hovardas, T. (2021). Social sustainability as social learning: Insights from multi-stakeholder environmental governance. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/su13147744>
- Michelle, V., Aurélie, D., Harriet, H. D., Mariana, C., Gail, S., Tillmann, B., Delvene, B., Robert, C., Vanessa, L., Maila, G., Dora, B., Pita, N., Janet, S. O., Alumita, S., Makrita, S., Wally, S., Tarateiti, T., & Anouk, R. (2025). Cross-cultural learning as a foundation for reimagining ocean governance. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 27(1), 49–65. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2024.2415363>
- Norström, A. V., Cvitanovic, C., Löf, M. F., West, S., Wyborn, C., Balvanera, P., Bednarek, A. T., Bennett, E. M., Biggs, R., de Bremond, A., Campbell, B. M., Canadell, J. G., Carpenter, S. R., Folke, C., Fulton, E. A., Gaffney, O., Gelcich, S., Jouffray, J. B., Leach, M., ... Österblom, H. (2020). Principles for knowledge co-production in sustainability research. *Nature Sustainability*, 3(3), 182–190. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0448-2>
- Priya, A. (2021). Case Study Methodology of Qualitative Research: Key Attributes and Navigating the Conundrums in Its Application. *Sociological Bulletin*, 70(1), 94–110.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

<https://doi.org/10.1177/0038022920970318>

van Noort, C., van Leeuwen, J., Toonen, H., van Tatenhove, J., Haapasaari, P., Flannery, W., Nielsen, K. N., Boteler, B., Passarello, C., Dyremose, S. C. S., Rathcke, K., & Varjopuro, R. (2025). A multi-layered collaborative marine governance model: Evaluating change and innovation of marine governance arrangements. *Environmental Policy and Governance*, 35(5), 779–793.
<https://doi.org/10.1002/eet.70002>